

ABSTRAK

Fenomena *aging population* (penuaan populasi) saat ini telah menjadi isu global yang melanda negara-negara di dunia. Salah satu dampak dari fenomena penuaan populasi yang menjadi persoalan adalah adanya *shrinking workforce* atau penyusutan tenaga kerja yang sangat berpengaruh bagi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara maju dan tentu saja negara-negara maju itu pula yang banyak terkena dampaknya. Beberapa opsi telah dipikirkan oleh para ahli, salah satunya dengan melonggarkan imigrasi agar pekerja-pekerja asing dapat bekerja di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Opsi ini sangat mungkin diterapkan apalagi di era globalisasi seperti saat ini dimana pergerakan manusia menjadi lebih mudah dilakukan. Dari sebagian besar negara maju yang menerapkan opsi tersebut, Jepang yang kasus penuaan populasinya paling mengkhawatirkan dan tidak bisa menerapkan opsi lainnya dengan lebih baik dalam hal penyusutan tenaga kerja justru tidak semakin melonggarkan kebijakan imigrasinya namun malah semakin memperketat kebijakan pengendalian imigrasi tersebut. Disini penulis ingin meneliti penyebab dari keputusan Jepang untuk tidak melonggarkan kebijakan imigrasi tersebut dengan menggunakan teori kebijakan imigrasi internasional yang melihat kebijakan pengendalian imigrasi suatu negara berdasarkan faktor sosioekonomi dan kebijakan luar negeri.

Kata-kata kunci: Penuaan populasi, penyusutan tenaga kerja, kebijakan imigrasi, faktor kebijakan pengendalian imigrasi.